

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet, dan pendapatan perkapita terhadap IPM pada lima negara ASEAN mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan Vietnam. Studi ini didasarkan pada teori-teori yang relevan untuk memastikan hasil penelitian yang ilmiah dan menyeluruh.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Teori Pembangunan Manusia

UNDP (Program Pembangunan Dunia) mendefinisikan pembangunan manusia pada tahun 1990 sebagai upaya untuk meningkatkan pilihan masyarakat. Fokus utama dari pembangunan ini adalah memperluas kemampuan dan peluang manusia dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terbatas pada aspek ekonomi. Definisi ini menjadi dasar konsep Pembangunan Manusia (*Human Development*), yang menekankan pada perkembangan manusia secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang secara langsung berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten. Dengan demikian, peningkatan

IPM cenderung memperluas peluang penyerapan tenaga kerja, karena ketersediaan tenaga kerja berkualitas dapat memenuhi kebutuhan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Terdapat beberapa teori dalam pembangunan manusia diantaranya sebagai berikut:

Teori Modal Manusia

Teori ini lahir pada tahun 1960 dan 1970, dikenal dengan konsep modal manusia, investasi dalam pendidikan dan kualitas tenaga kerja yang sama pentingnya dengan investasi aset berwujud. Menurut (Syarifah, Kholid Mawardi, & Iqbal, 2020) Manusia dalam konteks sumber daya tidak hanya dilihat sebagai alat produksi, tetapi sebagai modal (*human capital*) yang memberikan pengembalian (*return*). Setiap investasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas manusia, seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, dianggap sebagai bentuk investasi modal manusia.

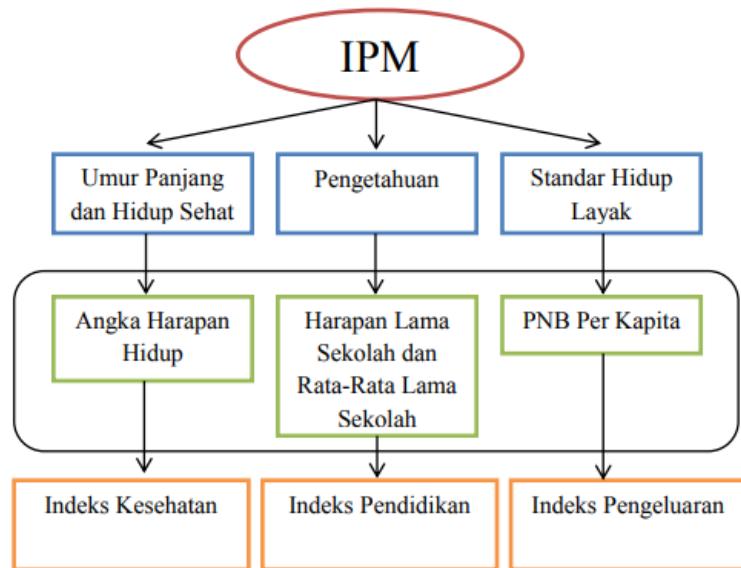
Ekonomi Sumber Daya Manusia

Menurut (Priyono & Marnis, 2008)Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Pendidikan sebagai salah satu komponen utama IPM berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah diserap oleh pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan dengan kualitas lebih baik. Selain itu, pendidikan yang baik meningkatkan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan

teknologi dan pasar kerja, sehingga memperbesar peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru.

2.1.1.2 Indikator Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990) yang dikutip dalam (Azfirmawarman, Magriasti, & Yulhendri, 2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui pendekatan kuantitatif yang disebut Human Development Index (HDI). HDI berfungsi sebagai alat evaluasi yang konsisten dalam menganalisis dan mengembangkan potensi manusia di berbagai wilayah. Pengukuran ini didasarkan pada tiga dimensi utama: kesehatan (dengan indikator harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup yang layak (penghasilan nasional bruto per kapita). Kriteria pengukuran HDI tergambar dalam bentuk bagan seperti di bawah ini:



Gambar 2. 1 Indikator Pengukuran dalam Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: (Azfirmawarman dkk., 2023)

Dalam bagan di atas menggambarkan tiga kriteria pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Azfirmawarman dkk., 2023):

1. Indeks Harapan Hidup

Salah satu komponen utama dari IPM adalah indeks Harapan Hidup, yang menggambarkan kesehatan masyarakat berdasarkan rata-rata usia hidup yang diharapkan sejak lahir. Kondisi kesehatan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkorelasi positif dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi. Sebuah formula digunakan untuk menghitung harapan hidup manusia, dengan batas minimum 20 tahun dan batas maksimum 85 tahun.

2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dihitung dengan membandingkan nilai aktual masing-masing indikator dengan nilai batas maksimalnya. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun, sedangkan harapan lama sekolah memiliki batas maksimum 18 tahun. Hasil dari kedua indikator ini kemudian digabung untuk menghasilkan nilai Indeks Pendidikan.

3. Indeks Standar Hidup Layak

Mutu kehidupan seseorang dapat diukur dengan berpedoman pada kriteria kehidupan yang layak. Dengan kata lain, kriteria ini menggambarkan ukuran kemakmuran yang dirasakan orang-orang yang terbentuk dari hasil kemajuan di bidang perekonomian yang terjadi. BPS menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita untuk menentukan mutu kehidupan, sedangkan UNDP memakai produk domestik bruto (PDB) secara riil.

2.1.1.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tonggak utama dalam menentukan bagaimana nilai pembangunan manusia atau keadaan masyarakat di suatu wilayah, khususnya dalam mengakses aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Untuk mencapai nilai IPM yang baik, diperlukan sinergi dari berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor yang berperan besar adalah pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan, mengingat fasilitas publik seperti sekolah dan layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar yang harus dapat diakses secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat (Rosyid dkk., 2021). Pemerintah yang memberikan alokasi anggaran secara tepat pada sektor ini akan memperbesar peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan yang memadai dan layanan kesehatan yang merata.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari meningkatnya pendapatan per kapita juga turut mendorong perbaikan IPM. Masyarakat dengan daya beli yang lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mampu menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan produktif (Sari, Aini, & Tukiran, 2022). Tidak kalah penting adalah peran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, yang kini menjadi jembatan baru dalam mempercepat pemerataan pendidikan dan akses informasi kesehatan. Akses internet yang merata dapat meningkatkan literasi digital, mendorong pembelajaran

daring, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada kualitas hidup (Jatmiko, Hendrawan, Arief, Putra, & Karyudi, 2023).

Tingkat urbanisasi juga menjadi faktor lain yang turut mempengaruhi IPM. Wilayah perkotaan cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan wilayah perdesaan, seperti rumah sakit, sekolah, serta sarana transportasi yang memudahkan mobilitas penduduk. Namun demikian, urbanisasi juga harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan tekanan terhadap fasilitas umum yang ada (Sapaat, CLapian, & Tumangkeng, 2020). Kualitas lingkungan hidup, seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan udara yang bersih juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendukung aspek kehidupan yang layak. Dengan demikian, peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada satu atau dua aspek, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan publik, infrastruktur, dan teknologi digital.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang tercermin dari bertambahnya alokasi anggaran di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Peningkatan peranan ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi

sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan dan penyedia layanan publik yang esensial.

Salah satu tujuan utama pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui belanja negara, terutama dalam bentuk belanja daerah, pemerintah berupaya menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas (Simarmata & Dinar Iskandar, 2022). Hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa belanja daerah harus diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prioritas ini diwujudkan melalui peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan sarana umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial (Susanto, 2016).

Kemudian dalam rangka optimalisasi efektivitas pengeluaran, pemerintah daerah wajib mempertimbangkan berbagai instrumen teknis seperti analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, realisasi belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan efisiensi pelaksanaan program-program publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan kebijakan yang terstruktur dan terarah, pengeluaran pemerintah dapat menjadi motor penggerak utama dalam pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta pemerataan akses layanan dasar.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk menjalankan fungsi negara dalam pembangunan dan pelayanan publik. Untuk memahami peran tersebut secara lebih mendalam, penting untuk mengetahui jenis-jenis pengeluaran pemerintah, baik berdasarkan sifat maupun tujuannya. Berikut merupakan jenis-jenis dari belanja atau pengeluaran pemerintah, sebagai berikut.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Investasi di sektor pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, mulai dari penyediaan infrastruktur fisik hingga pengembangan kurikulum dan kapasitas tenaga pendidik. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan (Hardianto & Nofriser, 2022).

Alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi jangka panjang, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pengeluaran pembangunan pada sektor ini dapat diarahkan untuk membangun

sarana pendidikan seperti sekolah, laboratorium, dan perpustakaan, serta menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang secara geografis maupun sosial ekonominya kurang terjangkau.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun sektor pendidikan tercermin dalam amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah pengalokasian minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Kebijakan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan nasional.

Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pada hasil pendidikan itu sendiri. Salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, maka kemampuan individu untuk memahami, mengadopsi, dan memanfaatkan internet dalam kehidupan kerja akan meningkat. Hal ini berimplikasi langsung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing bangsa secara keseluruhan.

anwar (2018) menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini berperan sebagai pengungkit utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas produktif masyarakat. Oleh karena itu, negara yang ingin mencapai

kemajuan harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara, yakni hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara pemerintah daerah minimal 10 persen dari APBD di luar gaji untuk sektor kesehatan.

Dari sudut pandang pembangunan sumber daya manusia, aspek kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Mutu manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang dimiliki. Kesehatan yang buruk, baik akibat kekurangan gizi, kalori, maupun akses terhadap layanan kesehatan, akan berdampak pada rendahnya kualitas manusia, termasuk keterbelakangan mental dan lemahnya produktivitas. Dengan demikian, pengeluaran di sektor kesehatan bukan hanya soal pemenuhan hak dasar, melainkan juga investasi dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional.

Sejalan dengan hal tersebut (Todaro dan Smith, 2003) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang ditujukan untuk penyediaan fasilitas dan layanan medis merupakan prasyarat penting dalam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Tenaga kerja yang sehat akan lebih mampu bekerja secara efisien, belajar dengan baik, dan berkontribusi secara optimal dalam kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan anggaran yang memadai untuk sektor kesehatan menjadi penting dalam kerangka pembangunan nasional. Selain itu, alokasi yang tepat dan efisien terhadap anggaran kesehatan juga dapat mempersempit kesenjangan layanan antara daerah, mempercepat pencapaian indikator kesehatan nasional, serta berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan.

2.1.2.3 Teori Belanja Pemerintah

Berbagai teori pengeluaran pemerintah telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana intervensi fiskal negara dapat mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Teori Wagner menyoroti bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap layanan publik termasuk pendidikan dan kesehatan akan meningkat. Sementara itu, teori Musgrave memandang pengeluaran pemerintah sebagai alat untuk alokasi sumber daya, distribusi kesejahteraan, dan stabilisasi ekonomi. Di sisi lain, pendekatan Keynesian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mendorong permintaan agregat, termasuk dalam bidang yang mendukung peningkatan IPM. Untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut.

1. Teori Wagner

Teori Wagner menyatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat secara proporsional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Studi oleh Lamartina dan Zaghini (2011) menemukan bahwa di negara-negara OECD, terdapat korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, mendukung validitas hukum Wagner.

2. Teori Musgrave

Richard A. Musgrave mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik seperti pendidikan dan kesehatan. Fungsi distribusi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui transfer dan subsidi. Fungsi stabilisasi berfokus pada menjaga stabilitas ekonomi makro. Ketiga fungsi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM dengan memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar dan menjaga kestabilan ekonomi yang mendukung pembangunan manusia.

3. Teori Keynesian

John Maynard Keynes berpendapat bahwa dalam situasi krisis atau stagnasi ekonomi, intervensi aktif pemerintah melalui pengeluaran publik diperlukan untuk mendorong permintaan agregat. Pengeluaran ini dapat

diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Keynesianisme menekankan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Teori Pembangunan Ekonomi

Michael Todaro dan Stephen C. Smith dalam teori pembangunan ekonominya menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi mencakup peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Mereka menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Belanja negara yang diarahkan pada sektor-sektor tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, sesuai dengan tiga dimensi utama IPM.

2.1.3 Penggunaan Internet

2.1.3.1 Pengertian Internet

Teknologi digital atau internet merupakan hasil penerapan ilmu pengetahuan dan rekayasa yang bertujuan untuk menciptakan solusi atas permasalahan praktis dalam kehidupan manusia. Menurut (Kizilhan & Bal Kizilhan, 2020), teknologi bukan hanya alat atau mesin, tetapi merupakan bentuk kapasitas sosial untuk memproses informasi dan mentransformasikan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, internet memainkan peran sebagai katalisator dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta akses terhadap layanan dasar masyarakat.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dikembangkan oleh UNDP, merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama: (1) umur panjang dan hidup sehat (*life expectancy*), (2) pengetahuan (*education attainment*), dan (3) standar hidup layak (*gross national income per capita*). Secara konseptual dan empiris, keterkaitan antara internet dan IPM sangat erat dan bersifat multidimensional. Penguatan peran internet dalam sistem pembangunan akan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, pemanfaatan internet harus diiringi dengan kebijakan yang mendorong akses yang setara, literasi digital, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Secara konseptual dan empiris, keterkaitan antara internet dan IPM sangat erat dan bersifat multidimensional. Penguatan peran internet dalam sistem pembangunan akan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Akses internet yang merata memungkinkan masyarakat pedesaan dan wilayah tertinggal untuk mendapatkan informasi dan layanan pendidikan maupun kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, internet juga dapat memperluas akses terhadap pelatihan keterampilan digital dan pendidikan jarak jauh, yang berdampak langsung pada peningkatan dimensi pendidikan dalam IPM.

Oleh karena itu, pemanfaatan internet harus diiringi dengan kebijakan yang mendorong akses yang setara, literasi digital, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah perlu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur digital ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin tidak tertinggal dalam proses transformasi digital. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan komunitas juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.2 Teori Internet

1. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen dikembangkan oleh Paul Romer sebagai respons terhadap keterbatasan teori pertumbuhan neoklasik yang menganggap teknologi digital atau internet sebagai faktor eksternal. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipandang sebagai hasil dari investasi yang berkelanjutan pada modal manusia, riset dan pengembangan (R&D), serta inovasi teknologi (Yuni. S, Murwiyati, & Herlina Sitorus, 2024). Pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai barang publik non-rival yang dapat direplikasi tanpa batas, sehingga semakin besar investasi dalam pendidikan dan inovasi, semakin tinggi pula potensi pertumbuhan suatu negara. Romer menekankan bahwa kebijakan publik yang mendorong peningkatan kapasitas inovatif dan kemampuan manusia menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan manusia, teori ini sangat relevan karena menyentuh tiga pilar utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM): pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Internet pendidikan berperan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan akses yang lebih merata, sedangkan internet dalam sektor kesehatan mendukung layanan medis yang lebih cepat, akurat, dan inklusif. Selain itu, pertumbuhan produktivitas yang didorong oleh inovasi meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengaitkan pengembangan internet dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang tercermin dalam IPM.

2. Teori Modernisasi

Teori Modernisasi, yang dikembangkan oleh Walt Whitman Rostow dan kemudian dilengkapi oleh Ronald Inglehart, menggambarkan pembangunan sebagai proses linear dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan industrial. Dalam kerangka ini, teknologi dianggap sebagai pendorong utama perubahan sosial dan ekonomi. Rostow mengusulkan lima tahapan pembangunan ekonomi, di mana tahap "take-off" menandai dimulainya pertumbuhan pesat akibat adopsi teknologi. Sementara itu, Inglehart menambahkan bahwa nilai-nilai modern seperti rasionalitas, efisiensi, dan pendidikan juga berperan dalam memperkuat dampak teknologi terhadap pembangunan manusia.

Menurut Suharto, 2002 dalam (Sayifullah & Ratu Gandasari, 2016) dalam konteks IPM, teori ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi mendorong transformasi institusi sosial, membuka akses terhadap pendidikan berkualitas,

memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, dan menciptakan pekerjaan yang lebih bernilai tambah. Proses modernisasi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kehidupan yang layak. Negara-negara yang berhasil mengintegrasikan teknologi dalam sistem sosial dan ekonominya menunjukkan tren peningkatan IPM yang konsisten. Oleh karena itu, modernisasi yang berbasis teknologi menjadi kerangka penting dalam memahami peran teknologi dalam mempercepat pembangunan manusia.

3. Teori Pembangunan Berbasis Internet

Teori Pembangunan Berbasis Internet menekankan bahwa penguasaan dan pemanfaatan internet merupakan strategi utama dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Teori ini berpandangan bahwa negara-negara berkembang harus secara aktif membangun kapasitas teknologinya sendiri, alih-alih hanya menjadi konsumen internet dari negara maju. Tokoh-tokoh seperti Sanjaya Lall dan Carlota Perez menyatakan bahwa ketertinggalan pembangunan sering kali disebabkan oleh kesenjangan dalam akses dan kemampuan mengembangkan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus menekankan pentingnya riset, pelatihan teknis, dan penguatan institusi teknologi digital lokal.

Dalam kaitannya dengan IPM, pendekatan ini menekankan bahwa teknologi bukan hanya alat produksi, tetapi juga fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Akses terhadap teknologi berupa internet yang berpengaruh pada

pendidikan seperti internet, e-learning, dan perangkat digital memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas (Hakim, 2022) . Di sektor kesehatan, inovasi lokal seperti alat diagnostik portabel atau sistem rujukan berbasis aplikasi membantu menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, pengembangan teknologi digital atau internet lokal menciptakan lapangan kerja dan mendorong inklusi ekonomi, yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berbasis teknologi dapat menjadi strategi integral dalam mendorong peningkatan IPM secara berkelanjutan dan merata.

2.1.4 Pendapatan Per kapita

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang fundamental untuk mengukur tingkat kemakmuran atau kesejahteraan rata-rata penduduk di suatu wilayah atau negara (Sari, N. K., & Putra, A. R., 2023). Secara sederhana, pendapatan per kapita didefinisikan sebagai total pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode waktu tertentu, umumnya satu tahun. Angka ini memberikan gambaran umum mengenai rata-rata kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Wijaya, D. A., & Santoso, 2022)..

Pendapatan per kapita bukan sekadar ukuran finansial, melainkan cerminan dari kapasitas ekonomi suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Tingginya pendapatan per kapita seringkali diasosiasikan dengan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapatan per kapita adalah nilai rata-rata dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi tetap bisa terjadi meskipun angka pendapatan per kapita tergolong tinggi.

Penggunaan pendapatan per kapita sebagai proksi untuk tingkat kesejahteraan memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya terletak pada kemudahan perhitungan dan ketersediaan data yang relatif mudah diakses. Namun, keterbatasannya adalah ia tidak memperhitungkan faktor-faktor non-moneter yang turut berkontribusi terhadap kualitas hidup, seperti kebahagiaan, keadilan sosial, atau keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian, pendapatan per kapita tetap menjadi alat analisis yang penting dalam perbandingan ekonomi antarnegara dan dalam menilai progres pembangunan (Lestari, R., & Handayani, S., 2021).

Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. IPM sendiri disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pendapatan per kapita berkaitan langsung dengan dimensi standar hidup layak, karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan akses terhadap layanan sosial. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki individu, semakin besar pula peluang

mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan IPM.

Selain itu, pendapatan per kapita juga berfungsi sebagai sumber daya ekonomi yang mendukung pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakatnya cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dalam menyediakan sarana dan prasarana dasar bagi warganya. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan individu, tetapi juga memberikan efek tidak langsung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendorong perbaikan aspek pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh (Sari, N. K., & Putra, A. R., 2023).

2.1.4.2 Teori Pendapatan Per kapita

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, dengan model Solow-Swan sebagai fondasinya, secara implisit menempatkan pendapatan per kapita sebagai ukuran utama dari tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Model ini berfokus pada akumulasi modal (fisik dan manusia), kemajuan teknologi, dan tingkat tabungan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka teori ini, peningkatan investasi dan produktivitas akan meningkatkan *output* per pekerja, yang pada gilirannya mencerminkan peningkatan pendapatan per kapita. Teori ini mengemukakan bahwa negara-negara cenderung menuju

kondisi *steady state* di mana pendapatan per kapita tumbuh pada tingkat yang sama dengan kemajuan teknologi (Lee, J. W., & Kim, H. Y., 2021).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo

Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, mengenai *Principles of Political Economy and Taxation* (1817) dalam (Harlina, 2024), juga menganalisis pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Ia mengemukakan teori tentang hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), terutama dalam konteks tanah pertanian. Menurut Ricardo, seiring pertumbuhan penduduk, lebih banyak tanah yang kurang subur akan digarap, yang akan menyebabkan hasil per unit tenaga kerja semakin menurun. Meskipun total *output* bisa meningkat, *output* per kapita mungkin akan stagnan atau bahkan menurun karena sumber daya yang terbatas dan pertumbuhan penduduk. Ini menunjukkan pandangan yang lebih pesimistik tentang prospek peningkatan pendapatan per kapita yang berkelanjutan dibandingkan Smith.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dipaparkan dalam tabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaruh	• IPM	• Pengangguran	Variabel	JIEI (Jurnal Ilmiah

	Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam	• Pengeluaran Pemerintah	• Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap IPM	Ekonomi Vol. 6, No. 2	Islam),
2	Emilia, Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran , dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu)	• IPM	• Jumlah Penduduk • Pengangguran • Kemiskinan	Variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan secara bersama-sama signifikan terhadap IPM	(Intelektiva) Jurnal, Ekonomi, Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 07	
3	Citra, Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah	• IPM	• Tenaga Kerja • PDRB • Tingkat Upah	Variabel tenaga kerja, PDRB, dan tingkat upah terhadap IPM	(OIKOS) Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Vol. 5, No. 2	
4	Zudrun, Pengaruh Pengeluaran Sektor pendidikan,	• Pengeluaran Pemerintah • Pendidikan • Pengeluaran Pemerintah	• Pengeluaran Pemerintah • Infrastruktur • Jalan	Variabel pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan,	JURNAL NIARA Vol. 15 No. 1	

	Kesehatan, dan Infrastruktur Jalan terhadap IPM di Provinsi Riau	Kesehatan • IPM	infrastruktur jalan, dan pendidikan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja.		
5	Martono, Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Model Regresi Linier (Studi Kasus di Kabupaten Bengkulu Utara Pada Tahun 2010-2021)	• IPM	• Tingkat Kemiskinan	Variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.	(JER) Ekonomi dan bisnis Review Vol. 10 No. 2
6	Indah, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan	• IPM	• Pengangguran • Kemiskinan • Jumlah Penduduk	Variabel kemiskinan, jumlah penduduk, dan pengangguran masing-masing memiliki pengaruh positif kemiskinan terhadap IPM	(MEA) Ilmiah manajemen ekonomi dan akuntansi. Vol. 7 No. 3
7	Zakiyatul, Analisis faktor yang berpengaruh terhadap IPM Menggunakan Regresi Linier	• IPM • Pengeluaran pemerintah	• Angka Harapan Hidup • Rata-rata Lama Sekolah • Hidup Layak	Variabel angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan hidup layak berpengaruh terhadap IPM	(Lebesgue) ilmiah pendidikan matematika dan statistika Vol. 2 No. 3

Berganda					
8	Trisno, Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006-2020	• IPM	• Kemiskinan	Variabel kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap IPM.	Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 8 .
9	Suhendi, Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan dan Pendidikan terhadap IPM di Papua Tahun 2017-2022	• IPM • Pengeluaran Pemerintah	• Tingkat Kemiskinan • PDRB	Variabel PDRB, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan variabel tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap IPM.	(MEA) Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Vol. 7 No. 2
10	Rivo, Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	• IPM	• Kemiskinan • Kondisi Ekonomi	Variabel kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap IPM, sedangkan variabel kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM,	Media Komunikasi Geografi Vol. 3 No. 1
11	Ihsan, Pengaruh Penduduk Miskin, Tingkat	• IPM	• Penduduk Miskin • Tingkat Pengangguran	Variabel PDRB, Tingkat pengangguran, Penduduk miskin masing-masing	(Ekuilnomi) Jurnal Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Vol. 4 No. 2

	Pengangguran dan PDRB terhadap IPM di Wilayah Provinsi Banten Pada Tahun 2019 – 2021	• PDRB	berpengaruh secara negatif terhadap IPM.			
12	Tjipto, Determinasi Tingkat Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karangasem - Kabupaten Bogor	• IPM	• Tingkat Pendidikan	Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM	Jurnal Management Vol. 7 No. 3	Mirai
13	Assa, Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia	• IPM	• Partisipasi Angkatan Kerja	Variabel partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap IPM	Jurnal Kajian Ruang Vol. 1 No. 1	
14	Diella, Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Kabupaten Tulungagung	• IPM	• Tingkat Kemiskinan • Laju Pertumbuhan Ekonomi	Variabel tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM	Independent: Jurnal Of Economics Vol. 2 No. 1	
15	Dastanta, Pengaruh Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah terhadap	• IPM	• Angka Harapan Hidup • Harapan Lama Sekolah	Variabel Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah masing-masing berpengaruh positif dan	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 6 No. 2	(JBN)

	Indeks Pembangunan Manuisa			signifikan terhadap IPM		
16	Rahmah, Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran, Pemerintah Sektor pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Kota Payakumbuh	• IPM • Pengeluaran Pemerintah	• Penduduk Miskin	Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan.	Jurnal Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo Vol. 9 No. 1	Ekonomi
17	Claudia, Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado	• IPM • Pengeluaran pemerintah Pendidikan	• Belanja Modal • Pengangguran	Variabel Belanja Modal dan Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Ilmiah EFISIENSI Vol. 23 No. 2.	Berkala
18	Lintang,	• IPM	• PDRB	ariabel	Bharanomics	

	Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur	• Tingkat Pengangguran Terbuka • UMR	independen produk domestik regional dan minimum regional berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Vol. 2 No. 1	Fakultas Ekonomi dan bisnis
19	Kasnelly, Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	• IPM	• Tingkat Pengangguran • Tingkat Kemiskinan	Variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap IPM.	AL- Mizan Jurnal Syariah Nadwah Tungkai Vol. 4 No 2
20	Imelda, Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan	• IPM	• Pendidikan • PDRB • Upah Minimum	Variabel pendidikan, PDRB, dan upah minimum masing-masing berpengaruh positif terhadap	Bharanomics Jurnal Fakultas Ekonomi dan bisnis Vol. 1 No. 2.

Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017	IPM.
---	------

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menggali inti permasalahan dalam penelitian. Dengan pendekatan ini, data empiris yang diperoleh dibandingkan dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kajian literatur, peneliti menentukan variabel independen yang memengaruhi indeks pembangunan manusia, yakni pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, dan pemanfaatan internet.

2.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berperan penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ketika anggaran pendidikan ditingkatkan, dana tersebut dapat digunakan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pendidikan, melatih tenaga pendidik, membangun fasilitas, serta memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar

untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan IPM secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anantika & Sasana, 2020) dari penelitiannya mengungkapkan bahwa dengan adanya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan IPM dikarenakan adanya peningkatan angka pendidikan dengan diukur dari angka lama bersekolah. Dengan adanya peningkatan pengeluaran di sektor pendidikan, maka akan meningkatkan fasilitas sekolah bahkan dapat membangun sekolah gratis baru untuk anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah, hal ini akan meningkatkan angka lama sekolah.

Selain itu peneliti lain seperti (Ariansyah, 2018) dan (Pratama & Mandai, 2023) yang mengatakan bahwa adanya hubungan positif pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM. Hal ini juga diperkuat dengan adanya teori *human capital* dan teori endogen yang mengatakan bahwa pendidikan dan pengetahuan merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena sumber daya manusia yang berkualitas mampu menciptakan inovasi dan produktivitas yang berkelanjutan. Pemerintah yang secara konsisten membiayai sektor pendidikan akan menciptakan efek pengganda terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan IPM.

2.2.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Ketika pemerintah meningkatkan anggaran di sektor ini, dana tersebut digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, menyediakan alat dan obat-obatan yang memadai, serta meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis melalui pelatihan dan insentif. Selain itu, anggaran kesehatan juga dialokasikan untuk program-program promotif dan preventif seperti imunisasi, kampanye gizi, dan pengendalian penyakit menular. Dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif, yang berdampak pada penurunan angka kematian dan peningkatan angka harapan hidup. Secara keseluruhan, hal ini akan mendorong peningkatan nilai IPM suatu daerah atau negara.

Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anantika & Sasana, 2020) dari penelitiannya mengatakan bahwa adanya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dikarenakan meningkatnya fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang menunjang angka harapan hidup dan juga kesehatan masyarakat disekitarnya. Hal ini juga diungkapkan oleh WHO terkait dengan peran pemerintah dalam mendistribusi pendanaan terkait kesehatan harus diperhatikan guna menunjang kesehatan masyarakat.

Selain itu penelitian (Ariansyah, 2018) dan (Pratama & Mandai, 2023) yang mengatakan bahwa adanya hubungan positif pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap IPM. Hal ini juga diperkuat dengan adanya teori *human capital* (modal manusia) yang dikemukakan oleh Becker yang menyatakan bahwa investasi dalam sektor kesehatan akan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, maka semakin besar pula kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan nilai IPM.

2.2.3 Pengaruh Penggunaan Internet terhadap IPM

Penggunaan internet memiliki peran penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama melalui dimensi pendidikan dan akses terhadap informasi yang mendukung kualitas hidup. Internet memungkinkan masyarakat untuk mengakses sumber belajar secara daring, mengikuti pendidikan jarak jauh, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan. Selain itu, internet juga mempercepat akses terhadap layanan kesehatan melalui medis berbasis internet, penyebaran informasi kesehatan, dan edukasi gaya hidup sehat yang dapat berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Dengan konektivitas yang baik, masyarakat juga memiliki peluang lebih besar dalam bidang ekonomi digital, yang dapat mendukung kesejahteraan dan pembangunan manusia secara lebih merata dan inklusif.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang serupa oleh (Iman dkk., 2024) dan (Nur & Indah, 2023) mengatakan bahwa Kemajuan teknologi digital atau

internet mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penyebaran informasi dan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan dari berbagai akses di bidang pembangunan manusia yang secara langsung akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut.

Selain itu juga dalam penelitian lain seperti (Prasetyowati & Lukis Panjawa, 2022) menunjukkan hasil bahwa penggunaan internet memiliki hasil yang signifikan dan positif terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers, yang menjelaskan bahwa adopsi internet dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam berbagai sektor pembangunan. Selain itu, internet juga mendukung pencapaian komponen-komponen IPM melalui digitalisasi pendidikan (*e-learning*), *telemedicine* dalam pelayanan kesehatan, serta peningkatan literasi digital masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

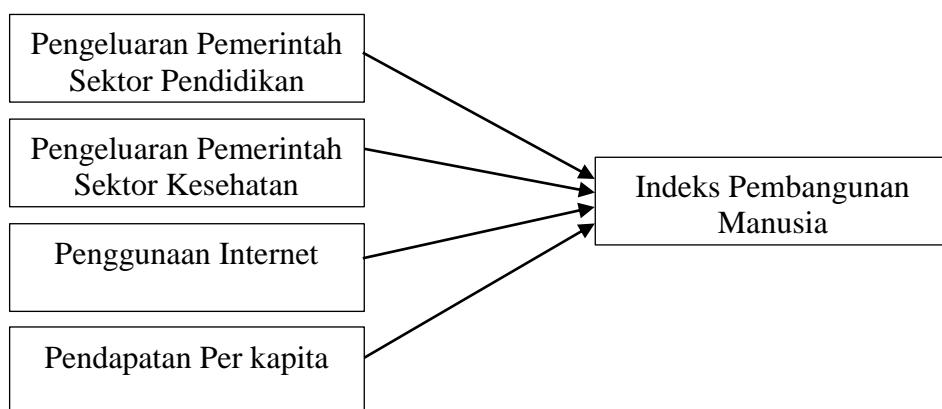
2.2.4 Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap IPM

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang berperan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara. Dalam konteks pembangunan manusia, pendapatan per kapita memiliki peran strategis karena memengaruhi kemampuan individu untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang menjadi komponen utama dalam perhitungan IPM. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan IPM.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan per kapita dan IPM. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Wahyudi, 2021) menemukan bahwa peningkatan pendapatan per kapita secara signifikan meningkatkan IPM di provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat yang memungkinkan mereka untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil.

Penelitian lain oleh (Prasetyo dan Dewi, 2020) juga mendukung temuan serupa, di mana pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komponen-komponen IPM seperti angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan penjabaran dalam kerangka pemikiran dapat di simpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan penggunaan internet berpengaruh signifikan secara positif terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian pustaka, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet, dan pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di 5 negara ASEAN pada tahun 2010-2022.
2. Diduga secara bersama-sama pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet, dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 5 negara ASEAN pada tahun 2010-2022.